

## Naskah Publikasi

### ANALISIS KESIAPSIAGAAN BENCANA BANJIR OLEH PEMERINTAH DESA KELURAHAN BARU KOTAWARINGIN BARAT DI MASA PANDEMI COVID-19

Anisa Jannatun Nafi'ah<sup>1</sup>, Oktomi Wijaya<sup>2</sup>

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan

Email:

[anisa18000289355@webmail.uad.ac.id](mailto:anisa18000289355@webmail.uad.ac.id)

#### INTISARI

**Latar Belakang** : Topografi Desa Kelurahan Baru merupakan *depression area* (lingkungan air dan sebagian besar adalah rawa) termasuk wilayah rawan banjir. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Kesiapsiagaan Bencana Banjir di Masa Pandemi COVID-19 Oleh Pemerintah Desa Kelurahan Baru.

**Metode** : Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan desain kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus atau *case study*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dan observasi dan data sekunder berupa telaah dokumen. Pengujian keabsahan data yaitu dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

**Hasil** : Pengetahuan Pemerintah Desa Kelurahan Baru menunjukkan tingkat yang memadai meskipun masih diperlukannya peningkatan sosialisasi guna pencegahan dan penanganan banjir dimasa pandemi. Kebijakan dan panduan Pemerintah Desa Kelurahan Baru telah menunjukkan upaya penanggulangan dengan menetapkan BPBD sebagai pelaksana namun, dalam konteks pandemi COVID-19. Rencana kesiapsiagaan, Pemerintah Desa Kelurahan Baru telah memiliki rencana kesiapsiagaan terkait bencana banjir selama Pandemi COVID-19, namun masih perlu dilakukan peningkatan dalam implementasinya. Peringatan dini bencana yang ada di Kelurahan Baru masih dalam proses pengajuan di BNPB, namun agar masyarakat lebih siap dan dapat mengambil tindakan. Mobilisasi Sumber Daya Pemerintah Desa Baru, telah dilakukan dengan cukup baik, baik dari segi sarana prasarana maupun sumber daya manusia dalam menghadapi bencana banjir.

**Kesimpulan** : Kesiapsiagaan bencana banjir di Kelurahan Baru dikatakan masih belum maksimal dikarenakan masih terdapat beberapa aspek yang kurang atau belum terpenuhi.

**Kata Kunci** : Kesiapsiagaan, Banjir, COVID-19

## **ABSTRACT**

**Background :** The topography of Kelurahan Baru Village is a depression area (water environment and most of it is swamp) including flood-prone areas. The purpose of this study is to analyze Flood Disaster Preparedness during the COVID-19 Pandemic by the Kelurahan Baru Village Government.

**Method :** This research method is a type of qualitative research that uses a descriptive qualitative design. This research uses a case study design. The data collection techniques used were primary data in the form of interviews and observations and secondary data in the form of document review. Data validity testing is by triangulating sources and triangulating methods.

**Results :** The knowledge of the Kelurahan Baru Village Government shows an adequate level, although there is still a need to increase socialization to prevent and handle flooding during a pandemic. Policies and guidelines, the Village Government of Kelurahan Baru has demonstrated mitigation efforts by establishing BPBD as the executor, however, in the context of the COVID-19 pandemic. The Village Government of Kelurahan Baru already has a preparedness plan related to flooding during the COVID-19 Pandemic, but it still needs to be improved in its implementation. The disaster early warning in Kelurahan Baru is still in the process of being submitted to BNPB, but so that the community is better prepared and can take action. Resource Mobilization The New Village Government has done quite well, both in terms of infrastructure and human resources in dealing with flood disasters.

**Conclusion :** Flood disaster preparedness in Kelurahan Baru is still not optimal because there are still several aspects that are lacking or have not been fulfilled.

**Keyword :** Preparedness, Flood, COVID-19

## A. PENDAHULUAN

Banjir merupakan bencana yang hampir terjadi setiap tahun di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sepanjang tahun 2019 telah terjadi 3.814 kejadian dengan 784 di antaranya merupakan bencana banjir<sup>1</sup>. Bencana banjir yang paling besar terjadi dalam 10 tahun terakhir pada tahun 2016 dengan hampir seluruh wilayah Indonesia<sup>2</sup> Bencana banjir ini mengakibatkan 250 orang meninggal, 1.413 orang luka-luka, 2.916.688 orang terdampak, 3.264 unit rumah rusak berat, 3.467 unit rumah rusak sedang, 8.141 unit rumah rusak ringan, 334.017 unit rumah terendam, 92 unit fasilitas kesehatan, 281 unit fasilitas peribadatan rusak, dan 1.137 unit fasilitas pendidikan rusak<sup>3</sup>.

Faktor pertama tingginya kejadian bencana banjir di Indonesia adalah disebabkan oleh tingginya curah hujan<sup>4</sup>. Faktor kedua yaitu vegetasi penutupan tidak mendukung penyerapan air hujan seperti hutan gundul dan lahan kritis. Faktor lainnya adalah faktor perilaku manusia/masyarakat yang eksploitatif terhadap lingkungan sehingga pemanfaatan lahan tanpa dilakukannya konservasi tanah dan air<sup>5</sup>.

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki beberapa kecamatan, salah satunya yaitu Kecamatan Arut Selatan<sup>6</sup>. Banyak permasalahan yang timbul di kawasan permukiman Bantaran Sungai Arut, salah satunya bencana banjir. Faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di kawasan Sungai Arut akibat musim penghujan dan kondisi pinggir sungai yang kotor oleh kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai<sup>7</sup>.

Pada awal tahun 2020 ini dibuka dengan adanya Virus COVID-19 yang melanda dunia. Banyak orang merasakan sesak napas, kejang-kejang, hingga akhirnya tidak sadarkan diri<sup>8</sup>. Kondisi ini sangat berdampak pada bencana banjir yang dirasakan oleh masyarakat pada masa COVID-19, tidak hanya pada kerugian fisik yang dapat mempengaruhi perekonomian warga, namun juga psikologi dan kesehatan warga sekitar. Untuk meminimalisir kerugian yang besar akibat ancaman bencana banjir, maka diharapkan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai untuk tetap siaga<sup>9</sup>. Bencana banjir mengharuskan masyarakat untuk berkumpul di lokasi pengungsian sedangkan COVID-19 mengharuskan warga untuk jaga jarak<sup>10</sup>.

Kesiapsiagaan adalah kegiatan yang bersifat perlindungan aktif yang dilakukan pada saat bencana terjadi dan memberikan solusi jangka pendek untuk memberikan dukungan bagi pemulihan jangka panjang. Parameter yang digunakan untuk kesiapsiagaan masyarakat adalah *framework* yang dikembangkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerja sama dengan UNESCO/ISDR pada tahun 2006. Ada lima parameter yang digunakan dalam mengkaji tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana yaitu 1) pengetahuan dan sikap tentang risiko bencana, 2) kebijakan dan panduan, 3) rencana tanggap darurat, 4) sistem peringatan bencana, 5) mobilisasi sumber daya<sup>11</sup>.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang di lakukan pada Hari Selasa, 29 Maret 2022 dengan mewawancarai salah satu perangkat daerah di Desa Kelurahan Baru, dapat diperoleh bahwa Desa tersebut merupakan wilayah yang rawan banjir akibat tingginya curah hujan. Akibat terjadinya bencana banjir yang sering terjadi, masyarakat mengalami beberapa gangguan kesehatan antara lain: gatal-gatal, demam, dan penyakit kulit lainnya. Pemerintah Desa Kelurahan Baru juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga imunitas tubuh dari mewabahnya Virus COVID-19 yang bersamaan dengan terjadinya bencana banjir karena kondisi tersebut akan memberikan dampak negatif dua kali lipat terhadap kesehatan tubuh.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan desain kualitatif deskriptif<sup>12</sup>, penelitian ini lebih mengutamakan jumlah subjek yang sedikit namun terfokus dari pada sekedar jumlah subyek yang banyak. Sedangkan jenis

penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan pendekatan yang digunakan yaitu studi kasus. Penelitian dilakukan di Pemerintah Desa Kelurahan Baru yang terletak di Jl. Ahmad Yani, Baru, Kec. Arut Sel., Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, 74112. Waktu penelitian dilaksanakan pada Bulan Juni-Juli 2022. Instrumen dalam penelitian ini yaitu *human instrument*, yaitu yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Alat penelitian yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah 1) Wawancara, 2) checklist observasi, 3) check list dokumentasi, 4) alat tulis, 5) *smartphone*<sup>13</sup>. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Model Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Proses pengujian keabsahan data yang peneliti peroleh pada lokasi peneliti, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode<sup>14</sup>.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

#### a. Pengetahuan dan sikap tentang risiko

Pengetahuan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap seseorang dan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu.

##### 1) Pengetahuan tentang bencana alam

*“Bencana alam merupakan suatu hal yang tidak terduga yang merupakan salah satu faktor tidak bisa diperhitungkan. Bisa diperhitungkan dalam artian mendapatkan peringatan dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) mengenai curah hujan, jadi bencana hujan itu merupakan suatu hak yang terduga di akibatkan oleh curah hujan yang sangat tinggi”. (informan 1)*

*“Bencana alam adalah sesuatu yang terjadi disebabkan oleh alam atau faktor manusia yang merugikan”. (informan 2)*

*“Bencana merupakan suatu hal yang merugikan masyarakat jadi dengan adanya banjir semua hal baik mobilitas masyarakat akan terganggu terutama diakibatkan oleh banyak sebab salah satunya banjir dengan penghijauan kembali, hujan-hujan yang ditebang oleh masyarakat serta perusahaan-perusahaan terutama kelapa sawit dan akhirnya menjadi hutan gundul”. (informan 3)*

*“Menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana adalah peristiwa yang mengancam kehidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia yang merusak lingkungan, kerugian harta benda dan faktor fisiologis. (Informan 4).*

*“Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (informan 5)*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Pemerintah Desa Kelurahan Baru membuktikan bahwa sebagian besar Pemerintah memahami mengenai bencana alam. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa bencana alam adalah peristiwa yang merugikan masyarakat karena terjadinya kerusakan alam yang disebabkan oleh ulah manusia ataupun faktor alamiah.

##### 2) Pengetahuan tentang potensi bencana yang ada di Kelurahan Baru

*“Hujan terus menerus, longsor, dan menurut data BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) ada 3 yaitu Kelurahan Baru masuk*

kedalam wilayah bencana kebakaran, banjir dan bencana rawan longsor.”  
**(Informan 1).**

“Sampah yang menumpuk di selokan, sumbatan pada selokan, ada perumahan yang tidak taat untuk membuat selokan melainkan menimbun sampah dan longsor” **(Informan 2).**

“Bencana yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor manusia **(Informan 4).** Berikutnya di tambahkan oleh Informan 5 yaitu, Gempa bumi, tanah longsor kemudian yang sering terjadi di Kotawaringin Barat ini adalah banjir” **(Informan 5).**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Pemerintah Desa Kelurahan Baru membuktikan bahwa Pemerintah Desa memahami mengenai kejadian alam apa saja yang dapat menimbulkan bencana. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa bencana seperti gempa bumi dan longsor dapat disebabkan oleh faktor alam seperti hujan terus-menerus dan faktor manusia seperti penimbunan sampah di selokan.

### **3) Pengetahuan tentang faktor penyebab terjadinya bencana banjir**

“Curah hujan yang tinggi dan pasangannya air laut mengakibatkan sungai tidak mengalir ke muara laut sehingga menyebabkan meluap dan masuk ke permukiman masyarakat” **(Informan 1).** “Ada 2 yaitu faktor alam dan buatan, faktor alam seperti curah hujan tinggi dan pasang air laut sedangkan faktor buatan yaitu manusia di karenakan human error dengan tidak menjaga lingkungan dalam artian fasilitas telah disediakan oleh pemerintah yaitu drainase namun masyarakat tidak memiliki keinginan untuk memelihara dengan membiarkan drainase yang tersumbat, selimen pasir dan Daerah Kampung Baru ini merupakan daerah rawa dengan kebiasaan masyarakat yang menimbun akhirnya tidak ada lagi serapan air” **(Informan 2 )**

“Kurangnya edukasi kepada masyarakat terutama masyarakat yang menggunakan hutan untuk pengkayuan dan juga peran pemerintah dalam memberikan edukasi kepada pihak perusahaan terutama perusahaan kelapa sawit tentang bahayanya penebangan liar atau pembukaan lahan secara liar” **(informan 3).** “Curah hujan yang tinggi dan adanya penurunan tingkat fungsi hutan karena adanya penebangan berlebihan jadi daya serap air berkurang”. **(Informan 4).** “Ada dua faktor terjadinya banjir yaitu faktor dari alam dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi dan faktor manusia yang tidak sadar akan kenersihan lingkungan”. **(Informan 5).**

Berdasarkan hasil wawancara di atas didapatkan bahwa menurut Pemerintah Desa Kelurahan Baru penyebab terjadinya banjir adalah hujan yang terjadi terus-menerus, masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan penggundulan hutan.

### **4) Pengetahuan tentang risiko penularan pada saat Banjir di Masa Pandemi COVID-19**

“Risiko tetap ada, karena saat banjir imun tubuh melemah dan masyarakat tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Selain itu, banjir juga membuat sisi psikologis masyarakat menjadi stress akibat terdampak banjir **(Informan 1,informan 2 & informan 3).**”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Lurah Desa Kelurahan Baru bahwa banjir di masa pandemi memiliki resiko terkena COVID-19. Banjir di masa pandemik dapat meningkatkan risiko terkena COVID-19 karena lingkungan yang tidak sehat dan imun tubuh melemah akibat stress karena banjir, dan belum perlu melakukan sosialisasi khusus terkait pengetahuan menangani banjir dimasa pandemi COVID-19.

## b. Kebijakan dan Per panduan

“Untuk kebijakan bencana kami mengacu pada Peraturan daerah kabupaten kotawaringin barat Nomor 1 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, utamanya terkait kebencanaan, evakuasi diatur SOPnya oleh BPBD, jadi kebijakan kebencanaan didesa baru ini ikut sama kebijakan bupati kotawaringin baru, kalau soal bencana dimasa covid-19 ini kebetulan memang belum ada kebijakan khususnya, yang beda itu yah ada beberapa protocol kesehatan yang memang harus terus dilakukan baik itu saat terjadi bencana maupun tidak.” (Informan 1). “Tidak ada kebijakan khusus, masyarakat pinggiran sungai jarang evakuasi karena mereka memilih tetap untuk tinggal dan membangun undakan di dalam rumah”. (informan 2). “Tidak ada, warga yang rumahnya terendam banjir di sarankan evakuasi tuk sementara tinggal di tempat yang sudah di arahkan Pemda, kalau pun di wilayah Kelurahan Baru di gedung balai bahaum dan di Sekretariat PKK.” (Informan 3).

“Pada prinsipnya penanganan SOP untuk mengatasi banjir baik itu dimasa pandemic atau tidak intinya sama saja. Intinya apabila kondisi saat banjir itu sangat bisa mengancam keselamatan jiwa manusia maka kita lakukan evakuasi untuk membawa ketempat sementara yang dianggap aman dari banjir”, “Resiko terkena Covid-19 di kondisi saat banjir ini ada karena imun tubuh yang menurun serta kami berupaya saat di posko penampungan masyarakat selalu menjaga jarak, cuci tangan dengan sabun dan melakukan aktivitas olahraga setiap pagi atau berjemur” (informan 4)

Didapatkan bahwa Pemerintah Desa Kelurahan Baru memiliki SOP yang baik mengenai bencana banjir dan tindakan evakuasi secara langsung kepada masyarakat dengan selalu menghimbau agar mengevakuasi diri mereka ke tempat yang lebih tinggi, namun Pemerintah Desa belum memiliki kebijakan khusus mengenai bencana banjir yang terjadi sebelum ataupun sesudah adanya COVID-19. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama antara Pemerintah Desa Kelurahan Baru, BPBD Kabupaten Kotawaringin, dan instansi terkait untuk menyusun panduan kesiapsiagaan bencana banjir yang sesuai dengan konteks pandemi COVID-19. Panduan ini akan memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat dan tim penanggulangan bencana dalam menghadapi situasi darurat banjir sekaligus mempertimbangkan langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19.

## c. Rencana Kesiapsiagaan

“Himbauan bagi masyarakat terkait kondisi banjir kalopun makin tinggi kita buka tempat pengungsian namun jangan sampai belum terjadi”. (Informan 1). “Menghimbau kembali kepada masyarakat terkait kondisi banjir disaat musim penghujan makin tinggi dan kita buka tempat pengungsian agar masyarakat bisa menepi ketempat yang lebih tinggi”. (informan 2). “Menghimbau ke masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kami selalu mengingatkan ke masyarakat agar selalu membersihkan selokan agar tidak buntu, membuang sampah pada tempatnya kemudian pemberian bantuan berupa sembako kepada warga”.(informan 3). “Kesiapsiagaan dari kita sebagai Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu sebelum terjadinya banjir kita sudah adakan sebuah sosialisasi kepada masyarakat agar tetap waspada kalau sewaktu-waktu terjadinya hujan lebat yang dapat menyebabkan bencana banjir. BPDB (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) juga menyiapkan sarana prasarana untuk melakukan evakuasi dan kami menyediakan kebutuhan logistik (Informan 4).”

Pemerintah Desa Kelurahan Baru memiliki rencana kesiapsiagaan bersama BPBD dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta menyediakan sarana prasarana seperti, perahu karet, rescue card, speedboat, perahu, tempat cuci tangan, pengukur suhu, sabun cuci tangan,

masker, handsanitizer dan logistik baik medis atau non medis yang disediakan seperti, sembako atau bahan pokok makanan, pakaian, obat-obatan untuk masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan lokasi penampungan korban yang lebih luas dengan sekat bilik antar keluarga yang memenuhi standar agar korban banjir dapat menjaga jarak sosial dengan lebih baik.

**d. Peringatan Dini Bencana**

*“Informasi mengenai tanda-tanda akan terjadinya bencana masih belum tersedia namun, kami mendapatkan informasi sebelum terjadi banjir melalui BMKG dan bersama BPBD mengenai curah hujan yang ekstrim yang dapat mengakibatkan bencana banjir di Desa Kelurahan Baru. Informasi selanjutnya kami dapatkan dari ketua Karang Taruna yang disampaikan oleh ketua RT melalui whatsapp grup kemudian disampaikan lagi kepada Lurah Desa Kelurahan Baru dan disebar luaskan melalui media sosial ataupun melalui himbauan langsung ke rumah-rumah warga dengan protokol kesehatan di masa pandemi” (Informan 1, Informan 2 & Informan 3). “Untuk peringatan bencana banjir di Kelurahan Baru tidak memiliki dokumen khusus atau flow chart namun, kami memiliki how chart mengenai informasi potensi banjir yang mungkin terjadi dengan memantau debit air pada alat water level data logger dan memantau aliran air saat pasang air laut agar aliran air sungai bisa turun ke muara (Informan 4).”*

Peringatan Dini Bencana Banjir Pemerintah Desa Kelurahan mendapatkan informasi sebelum terjadi bencana melalui BMKG dan bersama BPBD, Maupun melakukan pengamatan langsung terhadap Curah Hujan dan Debit air, Sebagai peringatan kepada Masyarakat informasi ini kemudian diteruskan kepada Lurah Desa Kelurahan Baru dan disebar luaskan melalui media sosial ataupun melalui himbauan langsung ke rumah-rumah, dimasa Pandemi Peringatan Dini bencana tidak hanya berupa peringatan akan terjadinya Bencana, peringatan dini juga diikuti dengan Himbauan agar tetap melakukan protokol kesehatan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih siap dalam mengambil tindakan yang tepat saat menghadapi ancaman bencana. Hal ini bertujuan untuk menjangkau seluruh masyarakat dan menyampaikan informasi terkait kemungkinan terjadinya bencana dengan secepat mungkin.

**e. Mobilisasi Sumber Daya**

*“Biasanya mereka melakukan secara mandiri kecuali adanya bantuan dari PMI yang suka relawan dan Kelurahan fungsinya sebagai koordinator saja.” ( Informan 1 ). “Membantu membawakan barang-barang penting untuk di amankan di tempat yang sudah di tunjuk pihak Pemerintah Kelurahan Baru dengan peralatan seadanya dari warga, semisal perahu sampan”. (Informan 3). “Kita langsung melakukan evakuasi dengan terjun ke lapangan apabila terjadi banjir atau ada sebuah laporan dari daerah, kemudian laporan masyarakat yang tempat tinggalnya rawan banjir dengan dataran rendah maka kita akan lakukan crosscheck apabila memang diperlukan sarpras. Kami juga membangun dapur umum di titik pengungsian yang disediakan dan sebagian dari bantuan-bantuan itu kita akan luncurkan ke lokasi yang terdampak banjir. Bukan hanya dapur umum dan tempat pengungsian yang kami sediakan pada masa pandemi ini kami juga menyediakan tempat cuci tangan, sabun, ,masker dan handsanitizer kemudian alat pengukur suhu untuk mendeteksi suhu tubuh pada pengungsi banjir” (Informan 4).*

Mobilisasi sumber daya manusia oleh Pemerintah Desa Baru sudah cukup terencana dengan baik. Namun, perlu diperhatikan bahwa sosialisasi dan simulasi terkait bencana banjir selama masa pandemi COVID-19 mengalami vakum yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa. Simulasi merupakan hal yang penting terkait penanggulangan bencana, karena

melalui simulasi, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan tentang tindakan yang harus dilakukan untuk menyelamatkan diri. Hal ini juga dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit yang lebih tinggi. Untuk meningkatkan persiapan dan kewaspadaan terhadap banjir selama pandemi COVID-19, pemerintah desa perlu melaksanakan simulasi dan mengalokasikan anggaran khusus dalam menghadapi bencana banjir di masa pandemi.

## 2. Pembahasan

### a. Pengetahuan dan sikap tentang risiko kesiapsiagaan bencana banjir pada masa Pandemic COVID-19 Oleh Pemerintah Desa Kelurahan Baru

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui pengetahuan Pemerintah Desa Kelurahan Baru Kotawaringin Barat Barat di Masa Pandemi Covid-19 tentang kesiapsiagaan bencana banjir sudah cukup baik. Selain sebagai penyedia kebutuhan masyarakat, secara umum pemerintah merupakan organisasi, badan, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-undang di wilayah tertentu<sup>15</sup>.

Menurut KBBI, banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan (yang biasanya kering) karena volume air yang meningkat. Terdapat dua faktor utama penyebab banjir yaitu faktor alam (*natural*) dan faktor manusia (*man made*). Faktor alam seperti tingginya curah hujan, topografi wilayah, pasang surut air dan lain-lain. Faktor kedua adalah manusia, utamanya bersumber pada unsur pertumbuhan penduduk akan diikuti peningkatan kebutuhan infrastruktur, pemukiman, sarana air bersih, pendidikan, serta layanan masyarakat lainnya<sup>16</sup>.

Pemerintah Desa Kelurahan Baru Kotawaringin Barat Barat memiliki pengetahuan yang cukup terhadap bencana. Hasil wawancara dengan BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat diketahui bahwa Kelurahan Baru masuk ke dalam wilayah rawan kebakaran, banjir, rawan longsor, dan gempa. Dalam menyebarkan pengetahuan terhadap ancaman bencana banjir, Pemerintah Desa Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan masyarakat di wilayah rawan banjir. Kegiatan sosialisasi terkait bencana banjir dimasa COVID-19 sangat penting. Sosialisasi bertujuan agar masyarakat dan siswa mengetahui sejak dini tentang penanggulangan bencana banjir di masa pandemi COVID-19 di Desa Baru Kecamatan Kotawaringin Barat. Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian<sup>17</sup> bahwa sosialisasi bencana berdampak signifikan terhadap pengetahuan dan kesadaran siswa. Selain itu, menurut penelitian dari<sup>18</sup> yang menjelaskan sosialisasi penanggulangan bencana memiliki pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan pengetahuan bencana pada masyarakat.

### b. Kebijakan dan panduan, kesiapsiagaan bencana banjir pada masa Pandemic COVID-19 Oleh Pemerintah Desa Kelurahan Baru

Berdasarkan hasil observasi penelitian, telaah dokumen, dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa Pemerintah Desa Baru Kabupaten Kotawaringin telah mengambil tindakan untuk melaksanakan kebijakan pengendalian banjir di kabupaten Kotawaringin. Kebijakan tersebut didasarkan pada Peraturan daerah kabupaten kotawaringin barat Nomor 1 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Dalam peraturan tersebut, BPBD ditetapkan sebagai unsur pelaksana urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada sub urusan Bencana di Kabupaten Kotawaringin.

Dalam penelitian juga, ditemukan bahwa Pemerintah Desa Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin tidak memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) khusus terkait kelayakan dan panduan dalam evakuasi serta pengelolaan tempat pengungsian terdampak banjir pada masa Pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks pandemi COVID-19.



Menurut BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dalam<sup>19</sup>, rencana kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana saat pandemi COVID-19 mencakup beberapa langkah penting. Beberapa langkah tersebut antara lain: Pertama Evaluasi Rumah Sakit: Rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah mereka akan terdampak oleh bencana alam. Kedua Tinjauan Kapasitas Tempat Evakuasi: Kapasitas Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) perlu ditinjau kembali untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menerapkan jarak fisik yang aman. Ketiga Persiapan Lokasi Pengungsian: Lokasi pengungsian perlu disiapkan dengan memastikan ketersediaan sarana kebersihan, seperti air bersih, peralatan cuci tangan, sabun, dan hand sanitizer.

Hal ini didukung Oleh penelitian Miaz<sup>20</sup> yang mengungkapkan bahwa kebijakan merupakan suatu cara atau pedoman yang dipergunakan untuk proses mengarahkan dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam konteks lain dijelaskan bahwa titik berat dalam kebijakan berada pada dampak dari suatu tindakan negara atau pemerintah yang secara signifikan dapat mempengaruhi masyarakat secara luas.

Keterbatasan dalam sosialisasi mengenai banjir juga dapat menciptakan potensi penyebaran COVID-19 di tempat pengungsian yang tidak terkelola dengan baik. Beberapa warga mungkin memilih untuk mengungsi ke rumah saudara daripada lokasi pengungsian yang disediakan oleh pemerintah, yang dapat menciptakan pengelompokan sosial yang tidak terkontrol dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Dalam menghadapi risiko-risiko ini, penting bagi Pemerintah Desa Kelurahan Baru dan BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat untuk segera mengembangkan panduan operasional standar (SOP) yang mengatur tindakan konkret dalam penanganan banjir selama pandemi COVID-19. Panduan ini harus mencakup langkah-langkah konkret seperti penyediaan panduan protokol COVID-19 di lokasi pengungsian, memastikan ketersediaan sumber daya kesehatan yang memadai, dan perencanaan pemulihan pasca banjir yang cermat.

Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah setempat, BPBD, dan instansi terkait dapat menghasilkan panduan yang efektif untuk menghadapi risiko ganda banjir dan COVID-19 di masa pandemi, menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama.

#### **c. Rencana tanggap darurat kesiapsiagaan bencana banjir pada masa Pandemic COVID-19 Oleh Pemerintah Desa Kelurahan Baru**

Rencana kesiapsiagaan dari Pemerintah Desa Kelurahan Baru telah disusun, namun belum terealisasi dengan sebaik-baiknya. Rencana tanggap darurat adalah langkah-langkah yang diambil untuk melakukan pencarian dan penyelamatan korban secara efektif dan efisien saat terjadi bencana<sup>21</sup>. Rencana ini menjadi bagian yang penting dalam kesiapsiagaan, terutama terkait dengan evakuasi, pertolongan pertama, dan penyelamatan korban bencana yang bertujuan untuk meminimalkan kerugian. Upaya ini sangat penting terutama pada saat terjadinya bencana dan dalam beberapa hari pertama setelah bencana sebelum bantuan dari pihak luar tiba<sup>22</sup>

Kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah yang diatur dalam (UU No. 24 Tahun 2007) tentang Pemerintahan Daerah, pasal 12 ayat (1) huruf 'e' menyatakan bahwa penanggulangan bencana masuk dalam rumpun urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pada rumpun urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Implementasi kebijakan ini ditegaskan dalam Peraturan (Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018) tentang Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal mengatur mengenai ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan

pemerintahan wajib yang harus diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Dalam keadaan darurat seperti bencana banjir, penting untuk memperhatikan pencegahan penularan COVID-19. Oleh karena itu, penanganan bencana banjir selama pandemi memerlukan rencana dan persiapan khusus. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam situasi krisis COVID-19 seperti sekarang, terdapat kecenderungan untuk terlalu fokus pada isu COVID-19 sehingga seringkali melupakan elemen bencana alam dalam strategi penanganan COVID-19. Selain itu, penting untuk memperhatikan bahwa sumber anggaran yang digunakan dan pelaksana tugasnya relatif sama antara penanganan bencana dan COVID-19<sup>23</sup>.

Penelitian ini sejalan dengan<sup>24</sup> yang menyatakan bahwa rencana tanggap darurat masih rendah karena masyarakat merasa bingung dan panik. Beberapa masyarakat memilih untuk berdiam di rumah daripada menghubungi kerabat atau mencari bantuan. Kurangnya rencana tanggap darurat dalam kesiapsiagaan bencana banjir dapat menyebabkan dampak buruk saat terjadinya bencana, terutama dalam masa pandemi. Dampak tersebut meliputi peningkatan angka korban jiwa, kerugian ekonomi, dan penyebaran penyakit yang semakin parah. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah Desa Baru Kabupaten Kotawaringin meningkatkan pelatihan dan simulasi dalam menghadapi banjir agar warga dapat lebih mengenal jalur evakuasi dan mengurangi kepanikan serta kurangnya distribusi bantuan kepada masyarakat saat bencana terjadi.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Kelurahan Baru di Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyusun rencana tanggap darurat kesiapsiagaan bencana banjir. Meskipun demikian, rencana ini belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Utamanya ketika bencana banjir dihadapkan pada persoalan pandemi covid 19, dampak ganda harus dihadapi dengan perencanaan yang matang agar masyarakat lebih siap ketika bencana benar-benar terjadi. Langkah-langkah yang telah diambil melibatkan BPBD dan mencakup upaya sosialisasi kepada masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana penting seperti perahu karet, mobil rescue, speed boat, tempat cuci tangan, pengukur suhu, sabun cuci tangan, masker, hand sanitizer, serta logistik seperti sembako, pakaian, dan obat-obatan.

#### **d. Peringatan bencana kesiapsiagaan bencana banjir di masa Pandemic COVID-19 Oleh Pemerintah Desa Kelurahan Baru**

Peringatan dini adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan memberikan peringatan kepada masyarakat secara cepat dan menyeluruh terkait kemungkinan terjadinya bencana. Peringatan ini disampaikan oleh lembaga yang berwenang menggunakan pesan yang jelas dan informasi yang mudah dipahami, dengan tujuan utama untuk menyelamatkan nyawa manusia<sup>25</sup>. Selain pengetahuan dan sikap kesiapsiagaan terhadap bencana, sistem peringatan dini juga merupakan faktor penting dalam menentukan kesiapsiagaan suatu kelompok atau lembaga dalam menghadapi ancaman bencana<sup>26</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Kabupaten Kotawaringin, sistem peringatan dini yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Baru Kabupaten Kotawaringin mengandalkan informasi dari BMKG serta melakukan pengamatan langsung terhadap curah hujan dan debit air. Sistem peringatan dini di Desa Baru Kabupaten Kotawaringin masih bersifat konvensional, yaitu menggunakan pengeras suara, HT, dan telepon. Belum ada alat sistem peringatan dini banjir yang lebih modern, seperti Early Warning System (EWS).

Dalam menghadapi bencana banjir, BPBD Kabupaten Kotawaringin menggunakan Pedoman Umum Prosedur Operasi Standar Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang kemudian disingkat PUSDALOPS PB. PUSDALOPS PB BPBD Kabupaten Kotawaringin merupakan unit organisasi (Satuan Tugas) fungsional pada BPBD yang didukung fasilitas sarana/prasarana. Penelitian ini sejalan dengan Kesiapsiagaan dan pencegahan sistem peringatan dini yang kurang matang akan berdampak pada efektivitas penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini yang tidak memadai, menghambat kemampuan masyarakat untuk mengambil tindakan yang diperlukan, seperti evakuasi atau mengambil langkah-langkah perlindungan pribadi.

Selain itu, perlu ada penggunaan teknologi modern seperti Early Warning System (EWS) untuk mempercepat proses peringatan dan memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi dengan lebih cepat. Hal ini akan membantu masyarakat untuk lebih siap menghadapi bahaya banjir dan mengambil tindakan yang tepat. Hal ini sesuai dengan Penelitian Mulyono<sup>27</sup> yang menyatakan Pola komunikasi peringatan dini (Early Warning System) EWS untuk mengurangi risiko akibat bencana sangat penting untuk dilakukan. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Dalam keseluruhan analisis, peringatan dini bencana banjir adalah komponen yang tak terpisahkan dari kesiapsiagaan bencana di masa pandemi COVID-19. Dengan penggunaan teknologi yang tepat, peningkatan peran PUSDALOPS PB, dan pendekatan komprehensif dalam memberikan informasi kepada masyarakat, Pemerintah Desa Kelurahan Baru dapat meningkatkan efektivitas sistem peringatan dini dan membantu melindungi nyawa dan harta benda masyarakat secara lebih baik saat menghadapi risiko ganda dari banjir dan penyebaran COVID-19.

**e. Mobilisasi sumber daya kesiapsiagaan bencana banjir di masa Pandemi COVID-19 Oleh Pemerintah Desa Kelurahan Baru**

Mobilisasi sumberdaya adalah upaya yang memastikan tercukupinya sumberdaya organisasi dalam pengembangan, pelaksanaan dan keberlanjutan pencapaian visi dan misi organisasi Putri<sup>28</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mobilisasi sumber daya kesiapsiagaan bencana banjir di masa pandemi COVID-19 oleh Pemerintah Desa Kelurahan Baru telah mencakup tiga aspek utama: sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan alokasi anggaran.

Hasil penelitian mengungkapkan dua permasalahan utama dalam kesiapsiagaan bencana di Desa Kelurahan Baru. Pertama, tidak adanya anggaran khusus yang dialokasikan oleh pemerintah desa untuk penanggulangan bencana. Hal ini terjadi karena pemerintah desa masih mengandalkan anggaran penanggulangan bencana dari kabupaten. Hal ini sesuai dengan Penelitian Mirjas<sup>29</sup> yang menunjukkan anggaran bencana di daerah rawan bencana mengalami fluktuasi walaupun kejadian bencana mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa dalam hal mengalokasikan anggaran untuk bencana, pemerintah daerah menghadapi kesulitan disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dalam mengalihkan anggaran untuk menanggapi peristiwa bencana dikarenakan rumit dan kakunya prosedur penganggaran.

Kedua, simulasi bencana yang telah dilakukan tidak melibatkan masyarakat secara aktif. Pemerintah desa masih menganggap bahwa simulasi kesiapsiagaan hanya perlu dimatangkan di lingkungan petugas, tanpa melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat umum. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferianto & Hidayati<sup>30</sup> yang

menjelaskan bahwa sebelum dilaksanakan simulasi menghadapi bencana responden tidak siap menghadapi bencana. Namun setelah dilakukan simulasi menghadapi ancaman bencana, responden mengetahui tentang hal yang harus dilakukan. Dan juga diperkuat dengan penelitian Firda dan Diah<sup>31</sup> berdasarkan Hasil penelitian kemampuan mobilisasi sumberdaya manusia dari 61,36% masyarakat yang telah mengikuti kegiatan pelatihan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan, dan 38,64% belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan kesiapsiagaan kebakaran hutan, didapatkan bahwa persentase kemampuan mobilisasi sumberdaya terbanyak adalah kriteria sangat tinggi yaitu sebesar 39%, disusul Kriteria Tinggi sebanyak 36%, kriteria agak rendah sebesar 16%, Sebesar 7% responden dengan kriteria sedang dan kriteria rendah sebesar 2%.

Mobilisasi sumber daya kesiapsiagaan bencana banjir di masa pandemi COVID-19 oleh Pemerintah Desa Kelurahan Baru memegang peran krusial dalam memastikan kesiapsiagaan dan respons yang efektif terhadap ancaman ganda dari banjir dan penyebaran COVID-19. Dalam konteks ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, mobilisasi sarana prasarana yang mencakup tempat pengungsian, peralatan evakuasi, dan fasilitas kebersihan sangat penting. Kedua, mobilisasi sumber daya manusia dalam bentuk tim tanggap darurat, PMI, Karang Taruna, dan sukarelawan masyarakat telah dilakukan dengan baik. Ketiga, alokasi anggaran yang memadai sangat penting dalam menjaga kelangsungan mobilisasi sumber daya.

Hal ini sesuai dengan Penelitian Apriyanti<sup>32</sup> Faktor penghambat Kesiapsiagaan yaitu tidak adanya Simulasi dikarenakan tidak, semua guru mendukung kebijakan mitigasi bencana, tidak semua materi dapat diintegrasikan dengan SSB, serta kurang komunikasi dengan lembaga yang menyebabkan kebijakan mitigasi dan penanggulangan bencana di SDN Baluwarti belum berjalan maksimal. Perihal Mobilisasi sumber daya juga diperkuat oleh penelitian Anugerah<sup>34</sup> yang mengatakan Kemampuan mobilisasi sumberdaya kaitannya dengan kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan meliputi sumberdaya manusia, bimbingan teknis dan penyediaan materi, pendanaan dan logistik, jaringan sosial serta pemantauan dan evaluasi.

Sebagai kesimpulan, mobilisasi sumber daya kesiapsiagaan bencana banjir di masa pandemi COVID-19 oleh Pemerintah Desa Kelurahan Baru adalah langkah yang penting untuk melindungi masyarakat dan mengurangi risiko dalam menghadapi ancaman ganda ini. Pentingnya perhatian terhadap sarana prasarana, sumber daya manusia, dan alokasi anggaran yang memadai menjadi krusial dalam konteks ini. Tanpa anggaran khusus untuk penanganan bencana, segala upaya akan terhambat, dan kebutuhan logistik yang seharusnya tersedia dalam penanganan bencana akan sulit terpenuhi.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang kesiapsiagaan Pemerintah Desa Kelurahan Baru dalam menghadapi bencana banjir pada masa pandemi COVID-19, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kesiapsiagaan berdasarkan Parameter Pengetahuan dan sikap Pemerintah Desa Kelurahan Baru terhadap bencana banjir selama Pandemi COVID-19, menunjukkan tingkat pengetahuan yang memadai. Meskipun demikian, diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat terkait penanganan banjir selama masa pandemi agar pengetahuan dan sikap kesiapsiagaan menjadi lebih efektif dan edukatif, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan banjir di masa pandemi.
2. Kesiapsiagaan berdasarkan parameter Kebijakan dan Panduan, Pemerintah Desa Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin telah menunjukkan upaya dalam

- menghadapi bencana banjir dengan menetapkan BPBD sebagai pelaksana urusan penanggulangan bencana di wilayahnya.
3. Kesiapsiagaan berdasarkan parameter Rencana Kesiapsiagaan, Pemerintah Desa Kelurahan Baru telah memiliki rencana kesiapsiagaan terkait bencana banjir selama Pandemi COVID-19.
  4. Kesiapsiagaan berdasarkan parameter Peringatan Bencana Pemerintah Desa Kelurahan Baru, Saat ini masih menggunakan metode konvensional Pemerintah Desa Kelurahan Baru perlu memperkuat sistem peringatan dini dengan pengembangan infrastruktur dan teknologi yang memadai, seperti Early Warning System (EWS), serta melakukan pelatihan dan simulasi bagi masyarakat.
  5. Kesiapsiagaan berdasarkan parameter Mobilisasi Sumber Daya Pemerintah Desa Baru, telah dilakukan dengan cukup baik, baik dari segi sarana prasarana maupun sumber daya manusia dalam menghadapi bencana banjir.

#### **E. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran kepada Pemerintah Desa Kelurahan Baru dalam menghadapi bencana banjir pada masa pandemi COVID-19 :

1. Kepada Pemerintah Desa Baru agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir selama pandemi COVID-19. Salah satu langkah penting adalah melakukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, Selain itu, perlu memperkuat rencana tanggap darurat dengan menyusun langkah konkret, termasuk jalur evakuasi dan pos penampungan dengan penerapan protokol kesehatan.
2. Kepada Lurah Desa Baru diharapkan melakukan koordinasi dengan instansi lain, seperti BPBD kabupaten dan Dinas Kesehatan, untuk memastikan penanganan bencana yang lebih efektif dan terkoordinasi, serta menganggarkan dana dan menyusun Kebijakan dan Panduan SOP khusus penanganan Banjir dimasa Pandemi COVID-19 untuk desa Baru.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar mengevaluasi implementasi rekomendasi yang telah diberikan untuk Pemerintah Desa Baru terkait kesiapsiagaan bencana banjir selama pandemi COVID-19.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

1. BNPB. *Infografis Update Bencana (2020)*.
2. CFE-DM. Center for Excellence in Disaster Management & Humanitarian Assistance. *Indones. Disaster Manag. Ref. Handbook. Hawaii Cent. Excell. Disaster Manag. Humanit. Assist. (2018)*.
3. BNPB. *Indonesia, Data Informasi Bencana (2020)*.
4. Sulaiman, M. E. *et al.* Analisis Penyebab Banjir di Kota Samarinda. *J. Geogr. Gea* **20**, 39–43 (2020).
5. Seno, A. Karakterisasi Bencana Banjir Bandang di Indonesia. *J. Sains dan Teknol. Indones.* **15**, 42–51 (2013).
6. Purwanto, E. & Gultom, J. Kajian Tipo-Morfologi Permukiman Tepi Sungai (Studi Kasus: Permukiman Tepian Sungai Arut Kota Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. *Tesa Arsit. J. Archit. Discourses* **11**, 77–91 (2013).
7. Rusmita, E. Faktor-Faktor Penyebab Menurunnya Mutu Lingkungan Hidup Di Permukiman Bantaran Sungai Kelurahan Raja Kota Pangkalan Bun. **6**, 160–170 (2017).
8. Yanuarita H A, H. S. Pengaruh Covid-19 Terhadap Kondisi. *J. Ilm. Widya*

*Sosiopolitika E-Issn 2685-457 Pengaruh 58–71 (2020).*

9. Afni, Y. Analisa Kesiapsiagaan Masyarakat Pauh Dalam Menghadapi Permasalahan Kesehatan Pasca Bencana Banjir Bandang : Perspektif Penerapan Manajemen Bencana. *Menara Ilmu XII*, 79–88 (2018).
10. Natsir, N., Natsir, M. & Warsyidah, A. A. Penerapan Protokol Kesehatan Covid – 19 Relawan Palang Merah Indonesia Pada Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Sulawesi Barat. *3*, 72–84 (2021).
11. Hidayati, D., Widayatun, P. H. & Triyono, T. K. Panduan Mengukur Kesiapsiagaan Masyarakat dan Komunitas Sekolah. (2011).
12. Sugiyono, P. D. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* (2018).
13. Subandi. Qualitative Description as one Method in Performing Arts Study. 173–179 (2011).
14. Sugiyono, P. D. (2018b). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Penelitian ALFABETA, Bandung.
15. Natsir, N., Natsir, M., & Warsyidah, A. A. (2021). *Penerapan Protokol Kesehatan Covid – 19 Relawan Palang Merah Indonesia Pada Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Sulawesi Barat.* 3(3), 72–84.
16. Sulaiman, M. E. *et al.* Analisis Penyebab Banjir di Kota Samarinda. *J. Geogr. Gea* **20**, 39–43 (2020).
17. Fikri, A. F., Maarif, S., Widana, I. K. & Tyas, T. H. Kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Brebes Dalam Menghadapi Bencana Banjir Dimasa Pandemi Covid-19. *J. Ilmu Pemerintah. Widya Praja* **46**, 335–342 (2020).
18. Design, E. Efektivitas Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja Dengan Pemberian Modul Terhadap Perubahan Pengetahuan Remaja. 38–46 (2012).
19. BNPB. (2021b). *Penyusunan Rencana Evakuasi Bencana Banjir.* Burhanudin, A. I. (2020). Meraju Asa Di Tengah Pandemi Covid-19. (Yogyakarta : Deepublish, 2020), H. 117.
20. Miaz, Y. *Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih pada Masa Orde Baru dan Reformasi.* Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih pada Masa Orde Baru dan Reformasi (2012).
21. Fikri, A. F., Maarif, S., Widana, I. K. & Tyas, T. H. Kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Brebes Dalam Menghadapi Bencana Banjir Dimasa Pandemi Covid-19. *J. Ilmu Pemerintah. Widya Praja* **46**, 335–342 (2020).
22. Yusuf, Z. K. Pengaruh Penyuluhan Terhadap Tingkat Pengetahuan Masyarakat Menghadapi Bencana. *1*, 48–55 (2019).
23. Suwitri, S. Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penangg. *VI*, (2008).
24. Murbawan. Kesiapsiagaan Rumah Tangga Dalam Mengantisipasi Bencana Banjir Di Daerah Aliran Sungai (das) wanggu. (2017).
25. UU No. 24 Tahun, 2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. *Rev. Bras. Ergon.* **9**, 10 (2007).

26. Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. (2018).
27. Fikri, A. F., Maarif, S., Widana, I. K., & Tyas, T. H. (2020). Brebes regency government preparedness in facing flood disasters in the pandemic time of covid-19. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(2), 335–342. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v>
28. Mulyono, Dkk ( 2019). *Membangun Pola Komunikasi Peringatan Dini (Early Warning System) Banjir DAS Kalijompo Kabupaten Jember*. : Electronical Journal of Social and Political Sciences. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/E-SOS/article/download/32113/11430/>
29. Putri, T. A., Sekarningrum, B., & Fedryansyah, M. (2022). Gerakan Sosial dan Mobilisasi Sumber Daya dalam Memperjuangkan Pengakuan Kepercayaan Berbeda. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 9(1), 22. <https://doi.org/10.24036/scs.v9i1.381>
30. Mirjas, (2021). *Analisis tren penganggaran bencana di daerah rawan bencana: studi kasus pada kabupaten aceh selatan*. *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol. 5 No. 2, <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/jka/article/download/5531/2656>
31. Ferianto, K., & Hidayati, U. N. (2007). *Simulasi Terhadap Perilaku Kesiapsiagaan Bencana Banjir Pada Siswa Sman 2 Tuban*.
32. Firda dan Diah. (2022). *KEMAMPUAN MOBILISASI SUMBERDAYA MASYARAKAT*. 02(01), 33–38.
33. Apriyanti. (2019). *Implementasi program mitigasi bencana melalui sekolah siaga bencana di sd negeri baluwarti, kotagede Yogyakarta*. 124 *Jurnal Kebijakan Pendidikan* Vol.8Nomor2. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/sakp/article/viewFile/15852/15337>
34. Anugerah. (2022), *kemampuan mobilisasi sumberdaya masyarakat Sebagai bentuk kesiapsiagaan bencana kebakaran Hutan dan lahan*. *Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS* Vol. 02, No. 01. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPIPS/index>